

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kinerja perusahaan merupakan hal yang penting dalam sebuah perusahaan. Jika kinerja perusahaan tidak baik maka strategi perusahaan tidak dapat terwujud, sehingga tujuan perusahaan tidak akan tercapai (Nuarista, 2013 dalam Diniarti, 2018). Kinerja perusahaan merupakan indikator penting bagi manajemen untuk mengukur efektivitas kegiatan dalam suatu perusahaan (Sugiarti dan Surachman, 2015). Kinerja perusahaan adalah pekerjaan yang dilakukan perusahaan selama periode waktu tertentu dan dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan (Rahmawati dan Khoiruddin 2017). Kinerja perusahaan merupakan ukuran keberhasilan manajer dalam menjalankan kegiatan. Informasi dalam kinerja perusahaan akan sangat berguna bagi para pemangku kepentingan bisnis seperti pemerintah, masyarakat, kreditur dan pemegang saham (Putra, 2016). Kinerja perusahaan didefinisikan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya melalui penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif serta menggambarkan sejauh mana perusahaan mencapai hasil. Selain itu juga dapat digunakan sebagai perbandingan dari kinerja sebelumnya, dan untuk mengevaluasi kinerja karyawan serta sejauh mana tujuan dan sasaran telah tercapai (Muhammad, 2008:14 dalam Nugrahayu dan Retnani, 2015).

BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional. Oleh sebab itu, perusahaan BUMN sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di dirikan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai perusahaan yang dikelola oleh negara bertanggungjawab untuk mengelola dan juga mengembangkan sistem penyediaan serta memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh masyarakat atau konsumen. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga bertanggung

jawab atas operasional perusahaan dan perencanaan aktivitas kinerja yang baik (Astari dan Rifa, 2016).

Menurut Salim (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa utang jangka pendek, utang jangka panjang dan total utang berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Dilansir dari ekonomi.bisnis.com menyatakan bahwa tren utang perusahaan BUMN di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 2016 dan cenderung meningkat selama 6 tahun terakhir. Peningkatan utang terjadi di perusahaan BUMN lembaga keuangan maupun non-keuangan. Pada tahun 2019 terjadi pandemi covid-19 di Indonesia yang mana situasi tersebut sangat mempengaruhi kinerja perusahaan BUMN. Tren utang perusahaan BUMN semakin melonjak akibat pandemi covid-19, dan juga meningkatkan risiko tak hanya bagi neraca keuangan perusahaan, juga fiskal dan perekonomian. Berdasarkan data Statistik Utang Sektor Publik Indonesia (SUSPI) Bank Indonesia, utang perusahaan BUMN Indonesia per kuartal III/2020 mencapai Rp2.140 triliun. Dilihat dari jatuh temponya, sejak 2018 utang BUMN lembaga non-keuangan meningkat lebih pesat dari lembaga keuangan, mencapai Rp996,49 triliun per kuartal III/2020. Perusahaan BUMN lembaga keuangan lebih didominasi oleh utang jangka pendek. Sedangkan perusahaan BUMN non-keuangan didominasi oleh utang jangka panjang. Kinerja perusahaan BUMN pada tahun lalu semakin terpuak oleh pandemi covid-19. Dampak paling besar terjadi pada BUMN sektor transportasi, konstruksi, serta sektor ekonomi semakin terpuruk akibat pembatasan kegiatan masyarakat yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha sehingga berdampak pada perekonomian dan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan BUMN masih menjadi indikator utama penilaian atas pencapaian manajemen perusahaan. Pandemi covid-19 sudah berlangsung selama 2 tahun di Indonesia. Dalam kurun waktu yang panjang tersebut, 90% perusahaan BUMN mengalami gejala dalam kinerja operasionalnya. Ada yang masih bisa bertahan meskipun merugi, ada yang mendulang untung, ada pula yang diterpa isu PHK atau pemutusan hubungan kerja (liputan6.com, 2021). Salah satu perusahaan BUMN terkena dampak dari pandemi covid-19 yaitu perusahaan **Garuda Indonesia**. Maskapai nasional ini mengalami kondisi kritis setelah diketahui memiliki utang Rp70 triliun. Utang perusahaan Garuda Indonesia terus bertambah Rp 1 triliun tiap bulannya. Beragam efisiensi dilakukan untuk mempertahankan hidup maskapai ini, mulai dari pemberian pinjaman, suntikan

ekuitas, hingga penawaran pensiun dini. Garuda Indonesia juga menanggihkan gaji komisaris untuk menekan biaya operasional. Selain itu, jumlah pesawat yang beroperasi dipangkas serta memetakan ulang kerjasama dengan penyewa pesawat (*lessor*). Akibatnya kinerja perusahaan ini terus menurun selama pandemi covid-19. Kinerja perusahaan BUMN masih menjadi indikator utama penilaian atas pencapaian manajemen perusahaan. Salah satu *proxy* yang digunakan dalam mengukur kinerja perusahaan adalah dengan *Return On Assets* (ROA). ROA merupakan indikator untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan besarnya investasi yang ditanamkan untuk mendapatkan keuntungan atau laba perusahaan (Astari dan Rifa, 2016).

Diversity atau keanekaragaman dalam perusahaan kini dianggap sebagai standar untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi tata kelola perusahaan atau sebaliknya. Keberagaman dalam dewan komisaris dan dewan direksi dapat dikategorikan berdasarkan usia, suku, ras, dan jenis kelamin. Keberagaman dewan komisaris dan dewan direksi juga diimbangi dengan keanekaragaman kepemilikan, pengalaman, pendidikan, dan status sosial ekonomi (Thoomaszen dan Hidayat 2020). Di Indonesia sendiri, keterlibatan wanita di dunia kerja ternyata lebih unggul dibanding tren dunia. Proporsi wanita Indonesia yang berhasil menjadi pimpinan senior manajemen mencapai 43%. Proporsi tersebut bahkan lebih baik daripada proporsi di Asia Pasifik sebesar 23%. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran wanita di jajaran manajemen puncak perusahaan di Indonesia mulai meningkat sedikit demi sedikit. Kedudukan wanita di dunia kerja sudah sangat diperhitungkan. Ditandai dengan banyaknya wanita yang menjabat dalam posisi penting berbagai organisasi. Dari organisasi nirlaba hingga perusahaan besar, termasuk perusahaan BUMN. Bahkan pimpinan kementerian BUMN sendiri adalah seorang perempuan. Peran wanita dalam perusahaan sangat berdampak besar bagi perusahaan Misalnya adalah Rini Soemarno yang pernah menjabat sebagai Menteri BUMN pada tahun 2014. Sebelumnya, ia pun pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kabinet Gotong Royong (2001-2004). Contoh lain yaitu Nicke Widyawati, pada tahun 2018 hingga saat ini menjabat sebagai Plt Direktur Utama Pertamina yang juga sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Perdagangan, Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT PLN pada tahun 2014.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti dijelaskan bahwa sifat kehati-hatian wanita membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja dimana wanita pada dasarnya menghindari risiko tinggi dan lebih memilih risiko yang lebih kecil dan aman untuk perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dengan direktur wanita sebenarnya membantu menetralkan sifat laki-laki dalam pengambilan risiko yang tinggi perusahaan (Thoomaszen dan Hidayat, 2020). Hasil dari penelitian Astari dan Rifa (2016) menyatakan bahwa gender dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan BUMN. Hal ini berarti perusahaan BUMN yang memiliki komisaris wanita lebih banyak maka akan semakin baik dan lebih efektif dalam menjalankan tugas dalam memaksimalkan kinerja perusahaan. Sedangkan gender dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan BUMN. Hal ini berarti bukanlah suatu permasalahan bagi perusahaan BUMN untuk memiliki direksi wanita, karena dengan adanya wanita ataupun pria yang menduduki jabatan direktur tidak akan mengurangi kinerja perusahaan, artinya komponen gender direksi tidak akan memberikan dampak pada perusahaan. Penelitian tentang pengaruh gender wanita dalam dewan terhadap kinerja perusahaan di Indonesia perlu dilakukan karena dewan perusahaan merupakan pihak yang secara langsung membentuk strategi dan keputusan perusahaan, yang akan menentukan arah masa depan perusahaan. Jenis kelamin dalam dewan yaitu wanita dan pria, dapat memiliki konsekuensi yang berbeda terhadap kinerja perusahaan. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan pengaruh gender wanita dalam dewan terhadap kinerja perusahaan. Kehadiran wanita dalam jajaran dewan akan meningkatkan kinerja perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persentase wanita dalam dewan perusahaan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Efek positif yang ada menunjukkan bahwa setiap peningkatan persentase wanita dalam jajaran dewan dikaitkan dengan peningkatan kinerja perusahaan. Dalam penelitian lain, ditemukan bahwa dewan wanita tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dalam penelitian Darmadi (2010) berpendapat bahwa memiliki dewan wanita dalam direksi akan menurunkan kinerja perusahaan.

Sebuah perusahaan dapat dianggap berafiliasi atau memiliki koneksi secara politik jika setidaknya salah satu pemegang saham utama atau dewan direksinya adalah anggota parlemen, menteri, kepala negara, atau seseorang yang memiliki hubungan sangat dekat

dengan anggota parlemen, politisi senior (Faccio, 2006 dalam Dharmayuni dan Suryati, 2014). Perusahaan yang terhubung secara politik memiliki lebih banyak sumber daya dan keunggulan kompetitif untuk perusahaan, yang akan mengakibatkan menjadi kinerja masa depan yang lebih baik. Hubungan politik menguntungkan perusahaan, termasuk mencegah pesaing memasuki industri, mengurangi tarif pajak, dan memfasilitasi pinjaman bank (Ding dkk., 2014 dalam Diniarti 2018). Perusahaan yang terkoneksi secara politik cenderung lebih baik secara finansial daripada yang tidak terkoneksi. Seorang direktur perusahaan yang terkoneksi politik menunjukkan bahwa mereka berkontribusi untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Wu dkk., 2012 dalam Diniarti 2018). Koneksi politik tidak hanya merubah strategi keuangan perusahaan tetapi juga mempengaruhi kinerja jangka panjang perusahaan. Terbukti bahwa perusahaan yang terkoneksi politik mengalami kesulitan dalam membangun hubungan dengan pemerintah baru ketika koneksi mereka di pemerintah lama telah jatuh dari kekuasaan akan berkinerja lebih buruk dibawah pemerintah baru dan akan sulit meningkatkan masalah keuangan perusahaan (Leuz dan Gee, 2006 dalam Diniarti, 2018). Koneksi politik memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan bisnis suatu perusahaan, terutama di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi dan sistem hukum yang lemah (Faccio, 2006 dalam Diniarti, 2018). Dilansir dari kompas.com bahwa tingkat korupsi di Indonesia dapat dilihat dari indeks persepsi korupsi (*Corruption Perception Index*) yang dirilis oleh Lembaga *Transparency International* (TI). Indonesia naik dua poin menjadi 40 poin dari yang sebelumnya 38 poin pada tahun 2018. CPI Indonesia pada tahun 2019 menempati peringkat ke 85 dari total pengamatan terhadap 180 negara, dengan total skor CPI 40 dari total nilai 100 dengan ketentuan semakin besar skor yang didapat maka semakin bersih Negara tersebut dari korupsi.

Hubungan atau koneksi politik sudah menjadi hal yang umum di Indonesia. Khususnya pada perusahaan BUMN yang seringkali, melibatkan struktur organisasi perusahaan dengan orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah, baik komisaris maupun direkturnya. Misalnya di Indonesia, Basuki Tjahaja Purnama yang merupakan pemilik dari CV Panda dan PT Nurindra Ekapersada sekaligus pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2014 dan saat ini menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina. Contoh lainnya yaitu Hary Tanoesoedibjo yang merupakan pemilik MNC group serta

pendiri dan ketua umum partai Perindo. Adanya kekuatan politik dalam suatu perusahaan dapat memberikan kemudahan akses informasi bagi direksi yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diterapkan perusahaan, membuat mereka dapat memprediksi perubahan ekonomi dan mengurangi ketidakpastian (Sutrisno dan Fella, 2020). Wulandari (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dengan berlakunya Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang mengatur tentang sumber keuangan dan batas maksimal sumbangan kepada partai politik, hal ini menimbulkan dorongan untuk melakukan penelitian tentang hubungan atau koneksi politik dan kinerja perusahaan, karena salah satu alasan sumber keuangan partai politik adalah kontribusi dari perusahaan atau badan usaha. Pengaruh koneksi politik perusahaan pada kinerjanya penting untuk memahami hubungan antara politisi dan perusahaan serta pengaruhnya terhadap efisiensi alokasi sumber daya dalam perekonomian. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu keberhasilan suatu perusahaan tidak lepas dari pengaruh lingkungan politik (Nugroho, 2016 dalam Diniarti, 2018). Perusahaan yang berafiliasi secara politik sering mendapat keuntungan dari kendala yang mereka miliki atas pembayaran yang mereka lakukan, menyembunyikan atau menunda pelaporan (Leuz dan Gee, 2006 dalam Diniarti, 2018).

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa kinerja perusahaan BUMN mengalami penurunan pada periode 2018-2020 khususnya pada saat pandemi covid-19. Serta dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan tidak lepas dari peran penting dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan. Penelitian sebelumnya terutama berfokus pada pengaruh dewan direksi dan komisaris terhadap kinerja perusahaan BUMN (Astari dan Rifa, 2016). Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mencatat bahwa dewan wanita dalam komisaris dan direksi serta hubungan politik yang dimiliki perusahaan BUMN dapat berdampak pada kinerja perusahaan BUMN. Mengingat masih sangat sedikitnya keterwakilan wanita baik di dewan komisaris maupun di dewan direksi serta bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat berpengaruh secara politik di dunia bisnis, maka peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Dewan Wanita Dan Koneksi Politik Terhadap Kinerja Perusahaan** (Studi Empiris Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Periode 2018-2020)”.

1.2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis Pengaruh antara Dewan Wanita Dan Koneksi Politik Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Periode 2018-2020.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dewan komisaris wanita berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah dewan direksi wanita berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
3. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menemukan bukti empiris bahwa dewan komisaris wanita memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan.
2. Menemukan bukti empiris bahwa dewan direksi wanita memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan.
3. Menemukan bukti empiris bahwa koneksi politik memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan.

1.5. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan penelitian dalam pengujian secara empiris mengenai teori keagenan, khususnya yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, dewan wanita dan koneksi politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk memaksimalkan keuntungan

dan kinerja perusahaan melalui koneksi politik dan dewan wanita didalam didalam jajaran dewan perusahaan.

- b. Bagi Investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi investor pada saat melakukan investasi dengan melihat kinerja perusahaan yang memiliki koneksi politik dan dewan wanita didalam jajaran dewan perusahaannya.

1.6. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan pembaca mengetahui gambaran umum dari penelitian ini maka penulis memberikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini memberikan uraian tentang fenomena yang terjadi yang berisi tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini menguraikan tentang grand teori yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini termasuk definisi dari variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan bangunan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan tentang sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisa data dan pengujian hipotesis.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini menguraikan beberapa karakteristik dari objek yang diteliti yaitu tentang deskripsi data objek penelitian dan variabel penelitian, serta hasil pembahasan dari objek yang diteliti dengan menyajikan analisis data atas hasil dari pengujian.

BAB V Simpulan dan Saran

Dalam bab ini menjelaskan dari keseluruhan penelitian secara singkat tentang hasil yang sudah di uji dan memberikan saran terhadap penelitian yang telah dilakukan atau penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

Memberikan daftar buku – buku, literatur, jurnal – jurnal, penelitian terdahulu serta berita – berita yang digunakan sebagai acuan dan teori dalam penelitian ini.

Lampiran

Berisi tentang data yang mendukung dan memperjelas pembahasan dalam penelitian disemua BAB yang berbentuk tabel maupun gambar.